

# Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%

Kiko Armenita Julito<sup>1\*</sup>, Istifa Ramadani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>1</sup>kiko.julito@uta45jakarta.ac.id, <sup>2</sup>istifa1711@gmail.com

## Abstract

80% of state revenue comes from Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), Land and Building Tax (PBB), Land and Building Rights Acquisition Fee. The aim of the research is to obtain concepts and information regarding the Effect of an Increase in Value Added Tax (VAT) of 11%. The research method uses a qualitative approach with a systematic literature review. Data sources were obtained from Online News, YouTube, Social Media and Research Articles for 3 years, namely 2021 to 2023. The coding process and visualization of research results used Nvivo software. The research findings explain that first, goods are VAT free. Second, goods subject to VAT. Third, it has an impact on the prices of basic necessities. Fourth, inflation occurs. Fifth, the decline in people's purchasing power. Sixth, the reason for the increase in VAT rates. The increase in VAT to 11% has an impact on increasing APBN revenue

**Article Received:**

December 5<sup>th</sup>, 2023

**Article Revised:**

December 30<sup>th</sup>, 2023

**Article Published:**

December 31<sup>st</sup>, 2023

**Keywords:**

Taxes, VAT Rate Increase, Value Added 11%

**Correspondence:**

kiko.julito@uta45jakarta.ac.id

## Abstrak

Penerimaan negara 80% berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tujuan penelitian untuk memperoleh konsep dan informasi mengenai Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan systematic literature review. Sumber data diperoleh dari Berita Online, YouTube, Media Sosial dan Artikel Penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Proses coding dan visualisasi hasil penelitian menggunakan software Nvivo. Temuan penelitian menjelaskan bahwa pertama, barang bebas PPN. Kedua, barang yang dikenakan PPN. Ketiga, berdampak pada harga kebutuhan pokok. Keempat, Terjadi Inflasi. Kelima, menurunnya daya beli masyarakat. Keenam, alasan kenaikan tarif PPN. Kenaikan PPN menjadi 11% berdampak pada penambahan pemasukan APBN.

**Artikel Diterima:**

5 Desember 2023

**Artikel Revisi:**

30 Desember 2023

**Artikel Dipublikasi:**

31 Desember 2023

**Kata Kunci:**

Pajak, Kenaikan Tarif PPN, Pertambahan Nilai 11%

**Korespondensi:**

kiko.julito@uta45jakarta.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia sebanyak 80% sumber penerimaan negara berasal dari pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan keseluruhan Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia berdampak banyak kepada masyarakat (Rita & Astuti, 2023). Salah satu kelebihan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pajak pertambahan nilai, karena barang/jasa kena pajak dipungut secara terus menerus, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting sebagai sumber penerimaan devisa negara. Kebijakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% resmi diberlakukan di Indonesia pada 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah itu penerapan PPN akan dilakukan secara bertahap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.

Capaian penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang diteliti, diantaranya adalah menurut (Majid et al., 2023) menjelaskan tentang dampak dari kenaikan tarif PPN bagi masyarakat. Namun, kenaikan tarif PPN tersebut bertujuan untuk menajakkan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai

APBN. Lalu, penelitian menurut (Rita & Astuti, 2023) menjelaskan tentang dampak dari kenaikan PPN ditahun 2022 yang diimplementasikan pada April 2022, adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dikarenakan pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen tingkat akhir atau pembeli. Selanjutnya, (Feb & Dunci, 2023) menjelaskan tentang bagaimana pengaruh tarif PPN 11% dan tingkat pendapatan selama pandemi covid terhadap daya beli masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada masalah yang diteliti dan luaran penelitian yang dihasilkan. Luaran penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 plus, dengan gambar visualiasi coding yang digunakan sebagai dasar penentuan kesimpulan atau jawaban dari research question. Uniknya, penelitian ini menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber di internet seperti artikel penelitian, online news, youtube, dan media sosial seperti tiktok maupun instagram. Proses coding ini terbentuk dengan menggabungkan coding dalam satu model visualisai serta menetapkan kesimpulan dengan menggunakan prinsip triangulasi. Model penelitian ini masih baru dan belum banyak digunakan oleh para peneliti.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi dan yang dirasakan masyarakat setelah adanya pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif PPN pada orang selaku konsumen akhir dan pengusaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan konsep dan informasi tentang adanya pengaruh kenaikan PPN menjadi 11%. Informasi ini sangat diperlukan secara rinci, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang berpengaruh dari kenaikan tarif PPN tersebut. Informasi yang terbentuk didapatkan dari berbagai sumber, dan terbentuk menjadi suatu informasi yang akurat. Tujuan lain dari penelitian ini adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sistematis dan terkonsep tentang adanya pengaruh kenaikan PPN menjadi 11%.

Manfaat penelitian ini dapat membantu para masyarakat dimana pengaruh dari kenaikan tarif PPN tersebut dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya kenaikan tarif pajak tersebut memberikan perhitungan yang ketat bagi masyarakat yang dapat dilihat setelah direalisasikan kenaikan pajak 11% sehingga membuat masyarakat harus berusaha lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk memberikan informasi apabila ingin meneliti konsep adanya pengaruh kenaikan PPN 11%, maka artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bagi perusahaan yang ingin menyusun kebijakan dan perencanaan yang terkait usahanya yang berhubungan dengan PPN, maka artikel ini bisa digunakan sebagai referensi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pembaca dalam memperluas wawasan terkait adanya pengaruh kenaikan tarif PPN.

## **B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS**

Pajak merupakan kontribusi ataupun iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak pada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung yang dipakai guna kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN (Majid et al., 2023). Akan tetapi, menurut (Feb & Dunci, 2023) menyatakan bahwa kebijakan tarif PPN 11% mendapatkan kontra dari beberapa pihak karena waktunya yang dinilai kurang tepat walaupun saat ini pandemi sudah mulai membaik, tetapi masih banyak masyarakat yang pendapatannya belum stabil. Dan, menurut (Agasie & Zubaedah, 2022) ialah Pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan menjadi 11% per 1 April 2022, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan tarif pajak tersebut sesuai dengan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam aturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah sejumlah undang-undang sekaligus yaitu UU KUP, UU PPN, UU Bea Cukai, UU PPh, UU Penanganan Covid-19 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. PPN meningkat secara gradual menjadi 11% mulai april 2022, dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Pemungutan PPN atas barang/jasa atau usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final yang perinciannya akan diatur dengan PMK. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.

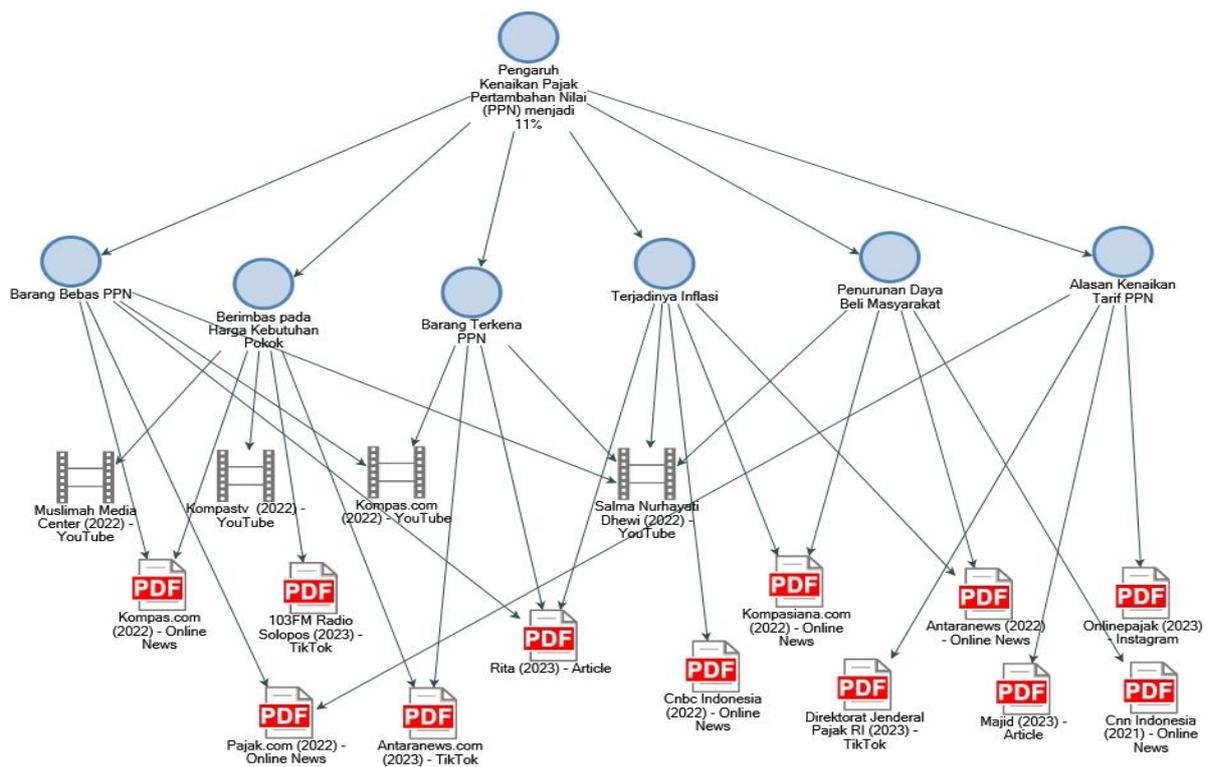
Mekanisme pemungutan PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*), maka dalam pelaksanaannya, PPN dapat dibebankan kepada pihak lain. PPN dikenakan atas pertambahan nilai (value added) seperti dari barang yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai yang dimaksud adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor – faktor produksi, seperti bahan baku, bahan pembantu yang diterima, biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga barang hasil siap dijual (Rita & Astuti, 2023).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan systematic literature review. Literature yang diteliti tidak hanya berasal dari artikel penelitian, melainkan dari beberapa sumber yang diperoleh secara online. Sumber data yang diolah berasal dari youtube, online news, artikel penelitian, dan dari media social lainnya. Sumber data harus berasal dari sumber yang kredibel, baik channel youtube, online news, dan sumber lainnya. Data dicari dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan research question. Pertimbangan mempergunakan data-data ini adalah karena ketersediaan data yang memadai di internet dan dapat diakses dengan mudah (Hafidhah & Yandari, 2021). Sampel data yang dipilih adalah data yang dipublikasi selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai 2023. Proses pengolahan data menggunakan software NVivo 12 Plus. Software ini dipilih karena mampu menghasilkan gambar visualisasi coding dan cara menggunakan software sangat user friendly (Tambun & Riris Rotua Sitorus, 2023). Ada empat tahapan yang dilakukan dalam proses olah data dengan NVivo, yaitu tahap input data, tahap coding, tahap visualisasi dan tahap kesimpulan (Sitorus & Tambun, 2023). Tahap pertama, input data menggunakan dua metode, yaitu input data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diinput ke NVivo tanpa menggunakan koneksi internet (Tambun et al., 2023; Heryanto et al., 2023). Data ini biasanya adalah data yang sudah tersedia di laptop, seperti artikel penelitian. Sedangkan data eksternal adalah data yang proses input ke NVivo menggunakan koneksi internet, proses input data menggunakan fasilitas ncapture for nvivo. Contoh data eksternal yang berasal dari internet seperti youtube, online news, dan berbagai media social. Tahap kedua, coding data yang sesuai dengan jawaban atas research question. Coding adalah kata atau kalimat sederhana yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada tahapan ini dilakukan content analysis, yaitu tahapan memahami kata atau kalimat yang ada di data penelitian (Tambun, 2022). Khusus proses coding untuk sumber data youtube atau sumber media social dalam bentuk video, coding dilakukan setelah ada transkrip dari content youtube atau video. Analisis dilakukan dengan cara membuat transkrip, lalu dilakukan proses coding (Salahudin et al., 2020). Tahap ketiga, membuat gambar visualisasi coding. Visualisasi coding adalah kumpulan coding yang membentuk gambar. Gambar coding saling terkait dengan berbagai sumber data. Gambar coding inilah yang dianalisis dalam proses pengambilan kesimpulan penelitian. Tahapan keempat, penetapan kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Jawaban dilihat dari coding-coding yang ada. Coding dianggap memiliki validitas yang kuat apabila coding terkonfirmasi dari berbagai sumber data. Validitas coding kuat apabila terkonfirmasi minimal tiga kali dari berbagai sumber data. Prinsip ini merupakan pengukuran validitas coding dengan menggunakan metode triangulasi (Natow, 2020). Selanjutnya coding diurutkan berdasarkan konfirmasi paling banyak hingga coding yang terkonfirmasi paling sedikit. Coding-coding inilah yang digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, sekaligus sebagai kesimpulan penelitian.

### D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menghasilkan beberapa referensi yang terdiri dari: 4 Youtube, 6 Online News, 4 Social Media yang terdiri dari 3 TikTok dan 1 Instagram serta 2 Artikel Penelitian. Proses coding dilakukan dengan menggunakan Software NVivo 12 Plus. Terdapat enam coding yang valid dan terkonfirmasi minimal tiga kali ke sumber data yang diteliti. Berikut disajikan gambar visualisasi coding yang dihasilkan.



Gambar 1. Visualisasi Codings

Semua coding pada figure 1 merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Coding berasal dari content analysis dari berbagai data yang diteliti. Proses pembuatan coding menggunakan fasilitas yang ada pada software NVivo 12 Plus. Berikut tabel summary dan intensitas dari setiap coding yang tercipta.

Tabel 1. Rekapitulasi Coding

No	Coding	Intensitas	Referensi
1.	Barang Bebas PPN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Ramadhan, 2022) – Online News</li> <li>• (Nurhidayah, 2021) – Online News</li> <li>• (Kompas.com, 2022) – YouTube</li> <li>• (Dhewi, 2022) – YouTube</li> <li>• (Rita &amp; Astuti, 2023) – Article</li> </ul>
2.	Barang Terkena PPN	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Kompas.com, 2022) – YouTube</li> <li>• (Dhewi, 2022) – YouTube</li> <li>• (Rita &amp; Astuti, 2023) – Article</li> <li>• (Antarnews, 2022) – TikTok</li> </ul>
3.	Berimbang pada Harga Kebutuhan Pokok	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Center, 2022) – YouTube</li> <li>• (Kompastv, 2022) – YouTube</li> <li>• (Ramadhan, 2022) – Online News</li> <li>• (Solopos, 2022) – TikTok</li> <li>• (Antarnews, 2022) – TikTok</li> </ul>
4.	Terjadinya Inflasi	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Dhewi, 2022) – YouTube</li> <li>• (Rita &amp; Astuti, 2023) – Article</li> <li>• (CNBC Indonesia, 2022) – Online News</li> <li>• (Adelia, 2022) – Online News</li> <li>• (Atmoko, 2022) – Online News</li> </ul>
5.	Penurunan Daya Beli Masyarakat	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Dhewi, 2022) – YouTube</li> <li>• (Adelia, 2022) – Online News</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CNN Indonesia, 2021) – Online News</li> <li>• (Atmoko, 2022) – Online News</li> </ul>
6.	Alasan Kenaikan Tarif PPN	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Nurhidayah, 2021) – Online News</li> <li>• (Ditjenpajakri, 2022) – TikTok</li> <li>• (Pajak, 2023) – Instagram</li> <li>• (Majid et al., 2023) – Article</li> </ul>

### Barang Bebas PPN

Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif. Barang yang termasuk bebas PPN, seperti : barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi), vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, air bersih yang termasuk biaya sambung/pasang serta biaya beban tetap, listrik dengan pengecualian untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA, rumah susun sederhana, rusunami, RS, dan RSS, terkait peternakan mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG, dan CNG) dan panas bumi, emas (baik emas batangan maupun emas granula), senjata atau alutsista dan alat foto udara. Adapun jasa yang dibebaskan dari PPN, seperti : jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional (Rita & Astuti, 2023).

### Barang Terkena PPN

Berdasarkan undang-undang ini, yang dikenakan pajak adalah barang yang dikenakan PPN, yaitu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak khusus atas barang mewah (PPnBM). Menurut situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Barang Kena Pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak serta barang tidak berwujud yang dikenakan pajak. UU PPN. Kategori barang yang kena PPN seperti : pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN (Dhewi, 2022).

### Berimbas pada Harga Kebutuhan Pokok

Dengan adanya kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen akan berimbas pada meningkatnya harga barang dan jasa, dikarenakan pihak yang terdampak dari kenaikan PPN adalah konsumen di tingkat akhir atau pembeli (Ramadhan, 2022). Imbas dari naiknya PPN mempengaruhi harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat (Solopos, 2022), maka masyarakat memangkas kebutuhan pengeluaran seperti kebutuhan makan dikarenakan harga kebutuhan pokok naik ditambah dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Apabila PPN dinaikkan, maka akan semakin mahal biaya bahan-bahan pokok yang lain, terlebih bagi mahasiswa yang belum berpenghasilan namun banyak kebutuhan yang diperlukan (Center, 2022).

### Terjadinya Inflasi

Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh cost-push akan membuat harga-harga barang meningkat serta biaya produksi yang terus merangkak naik dan cenderung membatasi daya beli masyarakat, yang notabene sudah terbatas sejak pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 pun akan melaju terbatas karena pembatasan daya beli membuat konsumsi masyarakat terhambat (Rita & Astuti, 2023). Pada saat pandemi, mempunyai pengaruh yang besar bagi sektor perekonomian, karena ekonomi di Indonesia dikendalikan oleh konsumsi rumah tangga, membuat berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan terjadinya inflasi. Dalam mengatasi terjadinya inflasi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan kebijakan menaikkan tarif pajak, yang dimana kebijakan tersebut diupayakan dapat membantu dalam pemulihan perekonomian. Sehingga, kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen telah direalisasikan (Adelia, 2022).

### Penurunan Daya Beli Masyarakat

Meningkatnya inflasi, khususnya inflasi pangan, akan menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% dari 10 menjadi 11% akan mempengaruhi daya beli masyarakat

dikarenakan kenaikan PPN yang terus mengerek naik dalam biaya produksi dan konsumsi yang membuat daya beli masyarakat melemah. Apabila daya beli yang menurun, maka utilitas dan penjualan melemah sehingga kinerja keuangan ikut terdampak dan tenaga kerja menurun (CNN Indonesia, 2021). Akibat terjadinya penurunan daya beli masyarakat karena PPN yang meningkat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Dhewi, 2022).

### **Alasan Kenaikan Tarif PPN**

Ada sebabnya mengapa pemerintah menaikkan tarif PPN ditengah kebutuhan yang sedang meningkat dan juga dalam masa pemulihan pandemi. Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa negara-negara berkembang yang tergabung dalam OECD, tarif PPN nya sudah berada di angka 15 persen, Indonesia ada di 11 persen dan akan dinaikan menjadi 12 persen pada tahun 2025. Sehingga, kenaikan menjadi 11 persen ini diharapkan mampu setara dengan negara berkembang lainnya secara perlahan (Ditjenpajakri, 2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, alasan utama kenaikan tarif PPN menjadi 11% adalah untuk meningkatkan penerimaan anggaran guna memperbaiki situasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selama ini terus mengalami defisit (Nurhidayah, 2021). Pasalnya, di masa pandemi APBN bekerja sangat keras. Inovasi diperlukan agar status APBN bisa membaik dan kembali berstatus surplus. Pemerintah memilih PPN sebagai ruang yang tepat untuk menghidupkan kembali APBN. Namun sebagian besar masyarakat menilai kenaikan tersebut dinilai tidak tepat dengan situasi saat ini. Menkeu menyebutkan tarif PPN di Indonesia masih termasuk kategori rendah apabila disandingkan dengan negara lain (Majid et al., 2023).

### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini telah menghasilkan kesimpulan dari jawaban research questions dan mendapat informasi secara akurat dan rinci dari beberapa sumber. Ada enam point dari pengaruh kenaikan pajak pertambahan nilai 11%. Keenam point tersebut adalah yang pertama yaitu barang bebas PPN. Kedua, barang yang dikenakan PPN. Ketiga, berdampak pada harga kebutuhan pokok. Keempat, terjadinya inflasi. Kelima, menurunnya daya beli masyarakat. Keenam, alasan kenaikan tarif PPN. Hasil dari penelitian ini direkomendasikan untuk masyarakat agar lebih bisa mengelola keuangan, baik dalam keuangan pemasukan maupun keuangan pengeluaran supaya kebutuhan hidup tetap terpenuhi dan implikasi hasil penelitian ini untuk masyarakat atau pebisnis yang ingin mengetahui dampak dari kenaikan PPN yang semula dari 10% menjadi 11%, informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan ataupun digunakan sebagai strategi penyusunan dalam perusahaan sehingga keenam poin tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kenaikan pajak sebesar 11% juga akan memiliki dampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Dampak kenaikan pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dinaikkan dan bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan tambahan tersebut. Biasanya, kenaikan pajak dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk pemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta mungkin menimbulkan reaksi dari masyarakat dan pelaku bisnis.

### **REFERENCES**

- Adelia, S. B. (2022). *Melihat Dua Sisi Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% di Masa Pandemi*.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Antaraneews. (2022). *Tarif PPN Naik 11 Persen Pulsa hingga Kebutuhan Pokok Ikut Naik*.
- Atmoko, C. (2022). *Ekonom nilai kenaikan PPN 11 persen akan menambah beban konsumen*.
- Center, M. M. (2022). *Kenaikan PPN menjadi 11 persen, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia? | Blusukan Kru MMC*.
- Dhewi, S. R. (2022). *Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per 1 April 2022 terhadap Masyarakat*.
- Ditjenpajakri. (2022). *Kawan Pajak, kenapa sih PPN harus naik? Yuk simak penjelasan dari Menteri Keuangan*

kita.

- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Hafidhah, H., & Yandari, A. D. (2021). Training Penulisan Systematic Literature Review dengan Nvivo 12 Plus. *Madaniya*, 2(1), 60–69.
- Indonesia, CNBC. (2022). *Benarkah Inflasi Bisa Tembus 5% Gegara Tarif PPN Naik?*
- Indonesia, CNN. (2021). *PDB Berpotensi Turun Jika Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen.*
- Kompas.com. (2022). *KSP: Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi.*
- Kompastv. (2022). *10 ke 11 Persen, Masyarakat Keluhkan Kenaikan PPN Berimbas pada Harga Kebutuhan Sehari-hari - YouTube.*
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. [https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v2i2.701](https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701)
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 20(2), 160–173.
- Nurhidayah, H. (2021). *Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 persen.*
- Pajak, O. (2023). *Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap 11% pada tahun 2024 dan berencana akan menaikkan tarif menjadi 12% mulai 2025.*
- Ramadhan, M. (2022). *Tarif PPN Naik 11 Persen, Apa Saja Dampaknya?*
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issue in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 369–398.
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pelatihan riset kualitatif bidang akuntansi dengan perangkat lunak NVivo pada prodi magister akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. *Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–21.
- Solopos, R. (2022). *PPN resmi naik jadi 11% pada Jumat (01/04/2022). Ketahui sektor apa saja yang terkena imbasnya.*
- Tambun, S. (2022). Peningkatan Kemampuan Melakukan Riset Kualitatif dengan Menggunakan Software NVivo 12 Plus di LAN Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.52447/jpn.v1i2.5663>
- Tambun, S., & Riris Rotua Sitorus. (2023). Pelatihan Aplikasi NVivo untuk Riset Kualitatif Bidang Akuntansi kepada Para Peneliti di Universitas Dhyana Pura. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 129–138. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i1.1298>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., Putra, R. R., & Julito, K. A. (2023). Pemanfaatan aplikasi NVivo 12 Plus untuk riset kualitatif di bidang akuntansi. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 359–372. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19401>
- Adelia, S. B. (2022). *Melihat Dua Sisi Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% di Masa Pandemi.* <https://www.kompasiana.com/salsabudiadeli07/629f57ff2154ae030e737bb2/melihat-dua-sisi-dampak-kenaikan-tarif-ppn-11>
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Antarnews. (2022). *Tarif PPN Naik 11 Persen Pulsa hingga Kebutuhan Pokok Ikut Naik.* <https://vt.tiktok.com/ZSL03JNKs/>
- Atmoko, C. (2022). *Ekonom nilai kenaikan PPN 11 persen akan menambah beban konsumen.* <https://www.antarnews.com/berita/2717073/ekonom-nilai-kenaikan-ppn-11-persen-akan-menambah-beban-konsumen>
- Center, M. M. (2022). *Kenaikan PPN menjadi 11 persen, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia? / Blusukan Kru MMC.* [https://youtu.be/QNeqe-dG97g?si=3l--5T8Eom\\_mRrgY](https://youtu.be/QNeqe-dG97g?si=3l--5T8Eom_mRrgY)
- Dhewi, S. R. (2022). *Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per 1 April 2022 terhadap Masyarakat.* [https://youtu.be/Sg3czgV9-88?si=2tRmBp1UrKgUp\\_HD](https://youtu.be/Sg3czgV9-88?si=2tRmBp1UrKgUp_HD)
- Ditjenpajakri. (2022). *Kawan Pajak, kenapa sih PPN harus naik? Yuk simak penjelasan dari Menteri Keuangan kita.* <https://vt.tiktok.com/ZSL0c2dXU/>
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap

- Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Hafidhah, H., & Yandari, A. D. (2021). Training Penulisan Systematic Literature Review dengan Nvivo 12 Plus. *Madaniya*, 2(1), 60–69.
- Heryanto, H., Tambun, S., Pramono, R., Priyanti, D., & Siregar, I. (2023). E-Learning quality: The role of learning technology utilization effectiveness teacher leadership and curriculum during the pandemic season in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1451–1462. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.017>
- Indonesia, C. (2021). *PDB Berpotensi Turun Jika Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211006161059-532-704228/pdb-berpotensi-turun-jika-tarif-ppn-naik-jadi-11-persen>
- Indonesia, C. (2022). *Benarkah Inflasi Bisa Tembus 5% Gegara Tarif PPN Naik?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401142703-4-328007/benarkah-inflasi-bisa-tembus-5-gegara-tarif-ppn-naik>
- Kompas.com. (2022). *KSP: Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi*. [https://youtu.be/KlySvzi6Jk0?si=SQkAznraUyCnd2\\_](https://youtu.be/KlySvzi6Jk0?si=SQkAznraUyCnd2_)
- Kompastv. (2022). *10 ke 11 Persen, Masyarakat Keluhkan Kenaikan PPN Berimbas pada Harga Kebutuhan Sehari-hari - YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=HjAn1sUHv58>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. [https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v2i2.701](https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701)
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 20(2), 160–173.
- Nurhidayah, H. (2021). *Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 persen*. <https://www.pajak.com/pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>
- Pajak, O. (2023). *Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap 11% pada tahun 2024 dan berencana akan menaikkan tarif menjadi 12% mulai 2025*. <https://www.instagram.com/p/CtLaf8CMB67/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>
- Ramadhan, M. (2022). *Tarif PPN Naik 11 Persen, Apa Saja Dampaknya?* <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/084500781/tarif-ppn-naik-11-persen-apa-saja-dampaknya-?page=all#:~:text=Adanya kenaikan PPN dari 10,di tingkat akhir atau pembeli>
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issue in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 369–398.
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pelatihan riset kualitatif bidang akuntansi dengan perangkat lunak NVivo pada prodi magister akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. *Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–21.
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Challenges, Strategies and Qualifications of Auditors In The Society 5.0 Era. *JRAK*, 15(2), 228–240. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.7183>
- Solopos, R. (2022). *PPN resmi naik jadi 11% pada Jumat (01/04/2022). Ketahui sektor apa saja yang terkena imbasnya*. <https://vt.tiktok.com/ZSL03jD62/>
- Tambun, S. (2021). Peningkatan Kemampuan Melakukan Riset Kualitatif dengan Menggunakan Software NVivo 12 Plus di LAN Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(2).
- Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pelatihan Aplikasi NVivo untuk Riset Kualitatif Bidang Akuntansi kepada Para Peneliti di Universitas Dhyana Pura. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 129–138.